

Sumber : KOMPAS	Hari/Tgl : <i>Jumat, 25 Feb 2022</i>	Hlm/Kol : <i>7/1-4</i>
Subjek : <i>UMKM</i>	Bidang : <i>HK. DAGANG.</i>	

Daya Tahan UMKM

Anton Hendranata

Direktur Utama BRI Research Institute, Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Banyak yang mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi.

Pendapat ini ada benarnya jika kita melihat pengalaman krisis ekonomi, moneter, dan politik Indonesia tahun 1998. UMKM saat itu terbukti cukup tangguh dan menjadi dewa penyelamat perekonomian Indonesia.

Perusahaan besar bertumbangan karena pelemahan nilai rupiah hampir 208 persen sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja di banyak sektor usaha. Kala itu, perekonomian Indonesia dalam titik nadir. Pertumbuhan ekonominya terkontraksi sangat dalam sampai minus 13,1 persen pada tahun 1998 dari positif 4,7 persen tahun 1997.

Namun, ada fenomena yang unik, di saat sektor formal tiarap, sektor informal dan usaha mikro malah menjamur dan membuat perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali. Tercatat penyerapan tenaga kerja informal meningkat signifikan dan bisa tumbuh positif 8,7 persen pada 1998 sehingga dapat menampung sebagian besar pekerja yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja).

Bisa dibayangkan betapa penting dan krusialnya sektor informal yang merupakan refleksi usaha mikro ketika pertumbuhan tenaga kerja formal turun signifikan 6,6 persen.

Resesi ekonomi 1998 pastinya jauh berbeda dalam banyak aspek dibandingkan resesi yang kita rasakan tahun 2020. Kondisi 1997/1998, sektor UMKM masih bisa beraktivitas normal dan tak ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga UMKM tak begitu terpuruk. UMKM tak dilarang bekerja dan berbisnis/berjualan. Tak ada anjuran untuk bekerja di rumah (*work from home*).

Dalam krisis ekonomi dan politik 1998, yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha kategori elite atau kaum konglomerat. Sebaliknya, resesi ekonomi 2020, semua lapisan pelaku usaha terpuruk, tak terkecuali UMKM.

UMKM yang katanya tangguh pada resesi ekonomi 1998 dibuat tak berkutik karena pandemi Covid-19. Jika UMKM tangguh menghadapi krisis ekonomi 2020, UMKM akan kembali menjadi penyelamat ekonomi. Namun, faktanya, UMKM harus ditolong, ditopang, mendapat perhatian khusus dan bantuan dari pemerintah, regulator, dan perbankan.

Situasi sulit yang dialami UMKM membuat pemerintah turun tangan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sangat besar. Begitu juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan sampai Maret 2023. Perbankan rela tak menerima pembayaran pokok dan bunga dari debitor yang sebelumnya sehat, tetapi karena Covid-19 usahanya rontok akibat sepi pembeli.

Ketangguhan UMKM sirna seketika karena adanya pembatasan sosial dan ekonomi yang ketat pada kuartal II-2020 dan pertumbuhan ekonomi

mengalami kontraksi yang sangat dalam, 5,3 persen. Untuk mengatasi keterpurukan UMKM, pemerintah mengucurkan dana PEN secara agresif sebesar Rp 112,4 triliun tahun 2020. Program restrukturisasi kredit untuk debitor UMKM yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 335 triliun juga dinikmati 4,6 juta UMKM pada 2020.

Resilien, adaptif

Berdasarkan riset yang dilakukan BRI Research Institute pada kuartal III-2020, memang betul pelaku UMKM sangat menderita. Covid-19 berdampak negatif terhadap 84,7 persen pelaku UMKM. Rata-rata pendapatan turun signifikan 53 persen. Dari rata-rata penurunan pendapatan ini, yang cukup miris, sekitar 72 persen menyatakan pendapatannya turun 40 persen lebih.

Pada kondisi di titik nadir ini, ada hal yang menarik dari UMKM dan ini merupakan poin plus dari UMKM.

Dari hasil riset BRI Research Institute pada kuartal II-2021, terbukti bahwa pelaku UMKM terlihat ringkih/mudah tutup usahanya, terutama segmen mikro, tetapi cepat bangkit untuk memulai usahanya kembali. Di segmen mikro, 74 persen responden menyatakan usahanya kembali normal hanya dalam kurun waktu enam bulan. Selanjutnya, ada sekitar 85 persen responden menyatakan mampu membayar cicilan pokok jika pandemi berakhir. Saya kira waktu pemulihan yang singkat ini membuktikan bahwa UMKM bersifat resilien, adaptif, dan mudah bangkit dari keterpurukan.

Keadaan ini diperkuat oleh data OJK, tren positif dari pemulihan UMKM terlihat dari

tren jumlah debitor restrukturisasi yang turun signifikan dari 4,6 juta pada Desember 2020 menjadi 3,1 juta pada November 2021. Artinya berkurang 1,5 juta debitor (33 persen).

Ini dampak dari program dana PEN dari pemerintah, program restrukturisasi debitor Covid-19 oleh OJK, dan kesediaan bank untuk menolong debitor yang tak mampu membayar cicilan dan bunga karena pandemi, yang secara kontinu terbukti berhasil membawa UMKM semakin membaik kondisi usahanya.

Dari hasil riset dari BRI Research Institute pada kuartal IV-2021 juga terlihat Indeks Bisnis UMKM meningkat signifikan dan optimistis pada kuartal IV-2021, dari 95,3 pada kuartal III-2021 menjadi 104,1 pada kuartal IV-2021. Dan ini sudah berada di zona optimistis karena indeksinya berada di atas 100.

Terus membaik

Kondisi sangat baik dan optimistis tak hanya terjadi pada kuartal IV-2021. Memasuki kuartal I-2022, pelaku UMKM terlihat lebih optimistis lagi. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 129,6 walaupun ada tekanan kenaikan kasus harian Covid-19 akibat varian Omicron pada awal 2022.

Selain Indeks Bisnis dan Indeks Ekspektasi Bisnis yang sangat menjanjikan, kondisi likuiditas dan rentabilitas UMKM juga dalam tren positif.

Pertama, kondisi likuiditas. Likuiditas dalam hal ini didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek (kurang

dari satu tahun). Pada awal pandemi (kuartal I-2020) sebanyak 45,6 persen menyatakan likuiditas usahanya lebih buruk dibandingkan kuartal IV-2019. Hanya 14,5 persen yang menyatakan lebih baik dan 39,9 persen menyatakan tetap, dengan indeks difusi 68,9, turun signifikan dari 129,7 pada kuartal IV-2019.

Sebaliknya, pada kuartal IV-2021 responden yang menyatakan kondisi likuiditasnya lebih buruk dari kuartal sebelumnya menurun signifikan menjadi 20,5 persen. Sekitar 28,2 persen menyatakan lebih baik dan 51,3 persen menyatakan tetap, dengan indeks difusi 107,7 pada kuartal IV-2021. Kondisi likuiditas usaha UMKM cenderung makin membaik sejak triwulan IV-2020, seiring dengan perekonomian yang kian pulih.

Kedua, bagaimana kondisi rentabilitasnya? Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Pada awal pandemi (kuartal I-2020), mayoritas pelaku UMKM (52,2 persen) menyatakan rentabilitas usahanya lebih buruk dibandingkan kuartal IV-2019.

Hanya 15,3 persen menyatakan lebih baik dan 31,5 persen menyatakan tetap, dengan indeks difusi 62,1, turun signifikan dari 133,5 pada kuartal IV-2019.

Sebaliknya, pada kuartal IV-2021 responden yang menyatakan kondisi rentabilitas usahanya lebih buruk dari kuartal sebelumnya turun ke 24,1 persen. Sekitar 34,1 persen menyatakan lebih baik dan 41,8 persen tetap, dengan indeks di-

fusi 110,0 pada kuartal IV-2021.

Keyakinan semakin pulihnya pelaku UMKM terlihat dari data rencana menambah modal usaha. Sebanyak 49 persen responden merencanakan menambah modal usaha dalam tiga bulan mendatang. Jika tambahan modal usaha didapatkan, mayoritas responden akan menggunakannya untuk hal produktif, yaitu (1) membeli barang *input*/barang operasional/suku cadang usaha (57 persen) dan (2) membeli dan memperbaiki peralatan usaha (16 persen).

Aura positif dari semakin pulih dan optimistisnya UMKM ini saya kira akan menular ke perekonomian Indonesia secara keseluruhan karena peranan UMKM sangat besar ke perekonomian nasional. UMKM Indonesia unik, kadang sebagai penolong, kadang perlu pertolongan. Bantuan pemerintah, regulator, dan perbankan pada UMKM pada saat krisis ekonomi karena pandemi Covid-19 terbukti berbuah manis.

Hal ini karena karakteristik UMKM yang cepat bangkit dan adaptif, serta lebih mudah dalam memulai kembali usahanya pada saat perekonomian semakin pulih dan membaik.

Berkaca dari keterpurukan UMKM selama pandemi Covid-19, diperlukan penguatan antara lain (1) pendampingan UMKM secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir untuk manajemen keuangan, produksi, dan pemasaran sehingga mampu bersaing dengan produk dari perusahaan besar atau impor dan (2) UMKM perlu terus dibimbing supaya semakin melek literasi keuangan dan digital sehingga bisa mengikuti perkembangan digital ekonomi yang melaju pesat.